

PENGARUH PDRB PER KAPITA, TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA DAN INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA TERHADAP KETIMPANGAN PENDAPATAN DAERAH DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM PERIODE 2018-2024

(STUDI PADA PROVINSI DI PULAU SUMATERA)

Mei Popy Gayatri¹; Siska Yuli Anita²; Rahmat Fajar Ramdani³

Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung^{1,2,3}

Email : meipopy022@gmail.com¹; siskayulianita@radenintan.ac.id²;

rahmatfajar@radenintan.ac.id³

ABSTRAK

Ketimpangan pendapatan merupakan salah satu permasalahan pembangunan ekonomi yang masih dihadapi Indonesia, termasuk di Pulau Sumatera yang memiliki perbedaan karakteristik ekonomi dan kualitas sumber daya manusia antarprovinsi. Kondisi ini mendorong perlunya kajian empiris terkait faktor-faktor yang memengaruhi ketimpangan pendapatan daerah. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh PDRB per kapita, tingkat pengangguran terbuka, dan Indeks Pembangunan Manusia terhadap ketimpangan pendapatan daerah di provinsi Sumatera tahun 2018-2024 dalam perspektif ekonomi Islam. Penelitian menggunakan data sekunder tahunan dari publikasi resmi Badan Pusat Statistik (BPS) dan dianalisis regresi dengan data panel menggunakan *Random Effect Model*. Secara parsial, hasil penelitian menunjukkan bahwa PDRB per kapita berpengaruh positif dan tidak signifikan, tingkat pengangguran terbuka berpengaruh negatif dan tidak signifikan, sementara Indeks Pembangunan Manusia berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan daerah. Secara simultan, ketiga variabel berpengaruh signifikan, yang menunjukkan pentingnya pengelolaan ekonomi dan peningkatan kualitas sumber daya manusia sesuai dengan prinsip ekonomi Islam.

Kata Kunci : PDRB Per Kapita; Tingkat Pengangguran Terbuka; Indeks Pembangunan Manusia; Ketimpangan Pendapatan Daerah

ABSTRACT

Income inequality remains one of the major challenges in Indonesia's economic development, including in Sumatra, where differences in economic characteristics and the quality of human resources exist across provinces. This condition highlights the need for an empirical study on the factors influencing regional income inequality. This study aims to analyze the effects of GDP per capita, the open unemployment rate, and the Human Development Index on regional income inequality in Sumatra Province during the period 2018–2024 from the perspective of Islamic economics. The study employs annual secondary data obtained from official publications of Statistics Indonesia (BPS) and applies panel data regression analysis using the Random Effect Model. The partial results indicate that GDP per capita has a positive but insignificant effect, the open unemployment rate has a negative but insignificant effect, while the Human Development Index has a negative and significant effect on regional income inequality. Simultaneously, all three variables have a significant effect, highlighting the importance of economic management and improving human resource quality in accordance with the principles of Islamic economics.

Keywords : GDP Per Capita; Open Unemployment; Human Development Index; Income Inequality

PENDAHULUAN

Permasalahan ketimpangan pendapatan menjadi salah satu tantangan utama dalam pembangunan ekonomi yang dihadapi oleh banyak negara berkembang, termasuk Indonesia kondisi ini tercermin dari perbedaan signifikan dalam distribusi kekayaan dan pendapatan antar kelompok masyarakat, yang berdampak langsung pada tingginya angka kemiskinan dan ketidaksetaraan sosial. Fenomena ini tidak hanya menjadi masalah di tingkat nasional, tetapi juga merupakan isu global yang memerlukan perhatian serius dari berbagai negara, baik maju maupun berkembang.

Pembangunan ekonomi merupakan proses jangka panjang yang meningkatkan pendapatan riil per kapita dan memperbaiki sistem kelembagaan. Pulau Sumatera, Sebagai pulau terbesar ketiga di Indonesia yang terdiri atas 10 provinsi, berperan penting dalam perekonomian nasional meskipun pertumbuhannya lebih rendah dibandingkan wilayah besar lain. Variasi geografis dan sumber daya antarprovinsi mendorong ketimpangan pembangunan yang bersifat struktural (Yulianita et al., 2023). Menurut Haughton dan Khandker, ketimpangan mencerminkan ketidakadilan proses pembangunan sejak era kolonialisme abad ke-17. Masalah ini berlanjut di Indonesia akibat tantangan pemerataan pembangunan regional dan desentralisasi awal 2000-an yang memusatkan aktivitas ekonomi di wilayah tertentu (Rahmadi et al., 2024).

Koefisien gini (Gini Ratio) digunakan sebagai indikator untuk mengukur tingkat ketimpangan distribusi pendapatan di suatu wilayah. Indikator ini menggambarkan ketidakseimbangan distribusi pendapatan antarpenduduk. Nilai koefisien gini yang lebih tinggi menunjukkan ketimpangan yang semakin besar, sedangkan yang lebih rendah mencerminkan distribusi pendapatan yang lebih merata (Barabasi & Atmanti, 2025).

Ketimpangan pendapatan antarprovinsi di Pulau Sumatera pada periode 2018-2024 menunjukkan fluktuasi yang signifikan, di mana pada tahun 2024 angka tertinggi tercatat di Provinsi Kepulauan Riau sebesar 0,357 dan terendah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebesar 0,235. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2023, Pulau Sumatera merupakan penyumbang PDB nasional terbesar kedua setelah Pulau Jawa dan memiliki peranan strategis dalam pembangunan ekonomi Indonesia, dengan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 22,01% yang menunjukkan bahwa potensi ekonominya yang besar belum sepenuhnya diikuti oleh pemerataan distribusi pendapatan (Etika et al., 2025). Kondisi ini dipicu oleh perbedaan kondisi geografis, sumber daya alam, dan demografi meningkatkan ketimpangan pendapatan nasional. Kondisi ini memerlukan upaya serius, salah satunya melalui distribusi kekayaan yang adil dan merata guna meningkatkan keadilan sosial. Dalam perspektif Islam, distribusi harta diatur secara spesifik agar kekayaan tidak terkonsentrasi pada kelompok

tertentu, serta tetap bermanfaat bagi yang membutuhkan. Hal ini ditegaskan dalam firman Allah SWT dalam Surah Al-Hasyr ayat 7:

مَا آفَاءَ اللَّهِ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَاللرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا أَنْتُمْ الرَّسُولُ
فَعُدُوهُ وَمَا نَحْكُمُ عَنْهُ فَأَتْتَهُمْ وَأَتْتُمُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۝

“Apa saja (harta yang diperoleh tanpa peperangan) yang dianugerahkan Allah kepada Rasulnya-Nya dari penduduk beberapa negeri adalah untuk Allah, Rasul, kerabat (Rasul), anak yatim, orang miskin, dan orang yang ada dalam perjalanan. (Demikian) agar harta itu tidak hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu terimalah. Apa yang dilarangnya bagimu tinggalkanlah. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah sangat keras hukuman-Nya.” (Q.S. Al-Hasyr [59]: 7)

Prinsip distribusi kekayaan Islam bersumber pada Al-Quran Surah Al-Hasyr ayat 7, yang menegaskan bahwa harta tidak boleh hanya beredar di kalangan orang kaya menunjukkan pentingnya pemerataan ekonomi. Zakat berfungsi sebagai sarana penyaluran harta dari kelompok mampu kepada yang membutuhkan, bertujuan meningkatkan kesejahteraan dan menekan ketimpangan pendapatan (Prasetyo et al., 2025).

Menurut Douglas C. North dalam Teori Pertumbuhan Neo-Klasik, ketimpangan antarwilayah berkaitan dengan tingkat pembangunan ekonomi nasional, yang dapat menimbulkan perbedaan pembangunan antar daerah. Ketimpangan pendapatan mencerminkan perbedaan penghasilan antar kelompok masyarakat, sedangkan ketimpangan antar daerah dipengaruhi oleh perbedaan demografi dan karakteristik wilayah yang menentukan kemampuan pembangunan (Cherend et al., 2023). PDRB per kapita merupakan nilai total barang dan jasa wilayah dibagi jumlah penduduk dalam satu periode, yang mencerminkan rata-rata aktivitas ekonomi per individu (Wijyaningrum, 2023).

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, perkembangan PDRB per kapita di beberapa provinsi Sumatera menunjukkan perbedaan yang signifikan selama tiga tahun terakhir. Provinsi Kepulauan Riau mengalami peningkatan konsisten dari Rp89,6 juta tahun 2022 menjadi Rp92,9 juta pada tahun 2023, dan mencapai Rp96,2 juta pada tahun 2024. Sebaliknya, Provinsi Bengkulu mencatatkan PDRB per kapita terendah selama dua tahun terakhir, yaitu Rp24,2 juta pada tahun 2022 dan Rp25,8 juta pada tahun 2024. Temuan ini sejalan dengan penelitian Yulikasari & Samsuddin (2025) yang menyatakan bahwa PDRB per kapita berpengaruh terhadap ketimpangan pendapatan karena mencerminkan tingkat aktivitas ekonomi masyarakat, sejalan dengan teori Kuznets yang menjelaskan bahwa ketimpangan dapat menurun apabila pertumbuhan ekonomi disertai pemerataan hasil pembangunan. Namun demikian, kenaikan PDRB per kapita tidak selalu diikuti oleh penurunan ketimpangan pendapatan antar daerah. Kondisi ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak selalu menghasilkan distribusi

pendapatan yang lebih adil, sehingga hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan pendapatan masih memerlukan kajian lebih lanjut dengan mempertimbangkan faktor-faktor lain yang turut memengaruhi distribusi pendapatan.

Teori Kuznets menjelaskan hubungan pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan pendapatan melalui hipotesis kurva U-terbalik, di mana ketimpangan meningkat pada tahap awal pembangunan karena manfaat ekonomi dinikmati sebagian kecil masyarakat sebelum akhirnya membaik setelah pendapatan per kapita naik melalui mekanisme redistribusi dan pemerataan (Yulikasari & Samsuddin, 2025). PDRB per kapita memengaruhi pola ketimpangan wilayah dengan *trade-off* pertumbuhan dan pemerataan. Ketimpangan tinggi mengancam stabilitas sosial-ekonomi, memerlukan pengelolaan ketat (Imaniah et al., 2024). Faktor pendorong utama ketimpangan ini adalah tingginya tingkat pengangguran terbuka sebagai persentase angkatan kerja yang tidak memiliki pekerjaan, yang menjadi indikator rendahnya kesejahteraan sosial karena hilangnya pendapatan tetap bagi banyak individu memperlebar disparitas ekonomi akibat ketidakseimbangan struktural antara pertumbuhan angkatan kerja dan kapasitas penyerapan tenaga kerja di berbagai sektor ekonomi (Badan Pusat Statistik, 2021).

Tingkat pengangguran terbuka tahun 2018-2024 di beberapa provinsi di Pulau Sumatera menunjukkan fluktuasi. Kepulauan Riau mencatat tingkat pengangguran terbuka tertinggi pada tahun 2024 dengan angka 6,39 %, sedangkan Riau berada pada posisi terendah dengan 3,70 % pada tahun 2024. Provinsi lain seperti Aceh dan Sumatera Barat masing-masing mencatat tingkat pengangguran 5,75 % pada 2024, sementara Sumatera Utara mencapai 5,60 % pada tahun yang sama. Perbedaan tingkat tersebut mencerminkan ketidaksamaan kondisi ketenagakerjaan antarwilayah. Penelitian yang dilakukan oleh Haidar dan Hastarini (2025) menunjukkan bahwa pengangguran berpengaruh positif signifikan terhadap ketimpangan pendapatan, yang berarti peningkatan jumlah pengangguran cenderung memperlebar kesenjangan pendapatan. Indeks Pembangunan Manusia juga ditemukan berpengaruh negatif signifikan terhadap ketimpangan pendapatan karena mencerminkan perbaikan pada aspek pendidikan, kesehatan, dan standar hidup masyarakat. Namun demikian, penelitian tersebut menganalisis data pada tingkat nasional sehingga belum secara khusus menggambarkan kondisi ketimpangan pendapatan antarprovinsi di Pulau Sumatera yang memiliki karakteristik ekonomi dan ketenagakerjaan yang berbeda dengan wilayah lain di Indonesia.

Menurut Kuncoro, pengangguran terbuka disebabkan pembangunan yang tidak merata dan terbatasnya lapangan kerja (Octavia, 2021). Pertumbuhan angkatan kerja yang tidak diimbangi kesempatan kerja menambah beban ekonomi daerah dan menahan laju pembangunan. Kondisi ini menurunkan pendapatan serta melemahkan kemampuan konsumsi masyarakat. Pengurangan pengangguran perlu diarahkan pada peningkatan kualitas tenaga kerja melalui

pendidikan, pelatihan dan perbaikan standar hidup (Ersad et al., 2022). Keberhasilan pembangunan ekonomi dilihat dari pertumbuhan ekonomi dan Indeks Pembangunan Manusia. IPM mengukur kualitas sumber daya manusia melalui kesehatan, pendidikan, dan standar hidup (Agustia et al., 2025). Nilai IPM rendah menunjukkan produktivitas dan pendapatan terbatas, sedangkan IPM tinggi mencerminkan produktivitas dan pendapatan lebih baik (Makipantung et al., 2023). Perbedaan IPM antar daerah menjadi faktor utama ketimpangan pendapatan dan penting dalam pembangunan berkelanjutan (Sutrisno et al., 2024).

Indeks Pembangunan Manusia pada dua tahun terakhir yaitu tahun 2023 dan 2024, menunjukkan Provinsi Kepulauan Riau memiliki nilai tertinggi, meningkat dari 77,11 menjadi 77,97. Sebaliknya Provinsi Lampung mencatat angka terendah meskipun mengalami peningkatan dari 71,15 menjadi 71,81. Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Jambi juga menunjukkan capaian positif masing-masing sebesar 74,03, 74,02 dan 73,43 pada 2024. Perbedaan nilai ini mencerminkan disparitas dalam pencapaian kualitas hidup dan pembangunan manusia di berbagai provinsi.

Ketimpangan pendapatan di daerah dipengaruhi oleh beberapa faktor ekonomi dan pembangunan manusia. Yerna Wiza dan Hesi Eka Puteri (2023) menemukan bahwa PDRB per kapita berpengaruh terhadap ketimpangan pendapatan. Peningkatan PDRB per kapita mencerminkan naiknya rata-rata pendapatan masyarakat, yang dapat memperluas kesempatan memperoleh pendapatan, terutama jika pertumbuhan ekonomi tersebar relatif merata antarwilayah. Namun, perbedaan PDRB per kapita antarwilayah menunjukkan bahwa distribusi ekonomi lokal tetap menjadi faktor penting dalam menentukan sejauh mana peningkatan pendapatan dapat menurunkan ketimpangan. Sementara itu, Ratiarum Fatika Yoertiara dan Nur Feriyanto (2022) menemukan bahwa tingkat pengangguran terbuka meningkatkan ketimpangan karena membatasi kesempatan memperoleh pendapatan, sedangkan Indeks Pembangunan Manusia memperluas peluang pendapatan melalui kualitas pendidikan dan kesehatan. Namun, meskipun IPM meningkat, keterbatasan lapangan kerja menyebabkan manfaat peningkatan kapasitas manusia belum dirasakan secara merata, sehingga efeknya terhadap penurunan ketimpangan pendapatan terbatas. Analisis ini menunjukkan bahwa TPT dan IPM saling terkait dalam menentukan distribusi pendapatan dan efektivitas peningkatan PDRB per kapita maupun pembangunan manusia sangat bergantung pada kemampuan daerah dalam menyerap pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan penelitian terdahulu, analisis masing-masing variabel dilakukan secara terpisah, sehingga terdapat celah penelitian untuk meneliti PDRB per kapita, tingkat pengangguran terbuka, dan Indeks Pembangunan Manusia secara bersamaan agar pengaruh gabungan ketiga faktor terhadap ketimpangan pendapatan dapat dipahami secara lebih menyeluruh.

Penelitian terdahulu telah menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi ketimpangan pendapatan, terutama melalui pendekatan ekonomi konvensional yang menekankan indikator makroekonomi seperti pendapatan daerah, tingkat pengangguran terbuka, dan kualitas sumber daya manusia. Namun, beberapa studi sebelumnya masih sedikit yang mempertimbangkan prinsip keadilan distributif dalam ekonomi Islam, sehingga pemahaman mengenai peran nilai-nilai Islam termasuk keseimbangan, keadilan sosial, dan perhatian terhadap kelompok kurang mampu dalam mengurangi ketimpangan pendapatan masih terbatas. Selain itu, banyak penelitian lebih berfokus pada kondisi nasional dan belum mengevaluasi perbedaan karakteristik antarprovinsi, padahal setiap daerah memiliki kondisi ekonomi dan kualitas sumber daya manusia yang berbeda.

Penelitian ini hadir untuk mengisi celah penelitian dengan menerapkan data panel sebagai metode analisis pada provinsi-provinsi di Pulau Sumatera selama periode 2018-2024, serta menggunakan perspektif ekonomi Islam sebagai kerangka normatif untuk menilai keadilan distribusi pendapatan dan efektivitas kebijakan ekonomi. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memperluas literatur mengenai ketimpangan pendapatan sekaligus memberikan dasar pertimbangan bagi perumusan kebijakan pembangunan daerah yang selaras dengan prinsip-prinsip keadilan Islam.

Dalam hal ini peneliti tertarik melakukan penelitian secara mendalam mengenai pengaruh PDRB per kapita, tingkat pengangguran terbuka, dan Indeks Pembangunan Manusia terhadap ketimpangan pendapatan daerah dalam perspektif ekonomi Islam periode 2018-2024 (Studi pada provinsi di Pulau Sumatera).

TINJAUAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Teori Ekonomi Pembangunan

Teori ekonomi pembangunan menurut Todaro dan Smith (2006) menjelaskan adanya *trade-off* antara pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pendapatan. Orientasi pembangunan pada pertumbuhan ekonomi seperti peningkatan PDRB per kapita menghasilkan pertumbuhan tinggi, tetapi sering tidak diikuti pemerataan sehingga distribusi pendapatan cenderung timpang sebagaimana dijelaskan hipotesis Kuznets. Menurut Kuznets, ketimpangan awalnya meningkat seiring peningkatan PDRB per kapita pada tahap awal pembangunan akibat alih fungsi tenaga kerja dari sektor pertanian ke industri yang lebih produktif, membentuk pola kurva U-terbalik di mana ketimpangan mencapai puncak sebelum menurun pada tahap lanjutan, dengan tingkatnya diukur menggunakan Indeks Gini dan Kurva Lorenz (Nafiah Azmi Nur Aisyah & Sishadiyati, 2024).

Sebaliknya, ketika pemerataan pendapatan menjadi fokus utama, distribusi pendapatan menjadi lebih merata meskipun pertumbuhan ekonomi cenderung melambat. Negara-negara

maju mengadopsi strategi *Redistribution with Growth* dengan memacu pertumbuhan ekonomi sekaligus redistribusi pendapatan melalui program pembangunan berorientasi pemerataan yang menyerap banyak tenaga kerja, sehingga menekan tingkat pengangguran terbuka. Pengangguran terbuka yang tinggi sebagaimana dijelaskan Kuncoro dan Sukirno menurunkan produktivitas serta daya beli masyarakat, sehingga memperlebar ketimpangan pendapatan antarwilayah (Manalu et al., 2025). Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang mencerminkan kualitas sumber daya manusia melalui kesehatan, pendidikan, dan standar hidup berperan mengurangi ketimpangan dengan meningkatkan produktivitas dan pendapatan masyarakat.

Teori Kuznets

Teori ketimpangan pendapatan dijelaskan melalui Hipotesis U-terbalik yang dikemukakan Simon Kuznets pada tahun 1955. Todaro dan Smith menjelaskan bahwa pada tahap awal pertumbuhan ekonomi ketimpangan pendapatan cenderung meningkat kemudian menurun seiring dengan kemajuan ekonomi. Hubungan tersebut dikenal sebagai Kurva Kuznets berbentuk U-terbalik yang menunjukkan perubahan ketimpangan pendapatan dalam proses pertumbuhan ekonomi (Windi et al., 2022).

Menurut beberapa ahli, ketimpangan pendapatan merupakan kondisi ketika masyarakat memperoleh pendapatan pada tingkat yang berbeda-beda, yang kemudian menyebabkan distribusi pendapatan nasional menjadi tidak merata (Gurusinga et al., 2022). Todaro dan Stephen (2006) menjelaskan bahwa ketimpangan terjadi karena adanya perbedaan pendapatan antar rumah tangga, di mana sebagian memperoleh pendapatan lebih tinggi dibandingkan yang lain sehingga menimbulkan kesenjangan distribusi. Kuncoro (2006) mengaitkan ketimpangan dengan perbedaan kemampuan daerah dalam mengelola sumber daya dan faktor produksi yang dimilikinya. Pandangan ini diperkuat oleh Sukirno menyatakan bahwa ketimpangan mencerminkan penyebaran pendapatan yang tidak seimbang di suatu wilayah, terutama ketika proses pembangunan tidak berlangsung secara seragam di seluruh daerah.

Ketimpangan Pendapatan Dalam Perspektif Ekonomi Islam

Ketimpangan pendapatan merupakan permasalahan ekonomi yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik faktor alam seperti kondisi geografis dan ketersediaan sumber daya alam, maupun faktor manusia seperti perbedaan tingkat pembangunan antar daerah (Sugiarto, 2025). Di Indonesia, perbedaan potensi wilayah serta ketimpangan dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya turut memperbesar kesenjangan pendapatan antar daerah. Dalam perspektif ekonomi Islam, pembangunan ekonomi tidak hanya berfokus pada pertumbuhan, tetapi juga harus berlandaskan prinsip syariah seperti keadilan, keseimbangan, dan keberlanjutan (Arbiansa et al., 2025). Instrumen distribusi seperti zakat, Infaq, dan sedekah berperan penting dalam mengurangi ketimpangan pendapatan melalui pemerataan kesejahteraan

masyarakat. Selain itu, ekonomi Islam menekankan pemenuhan kebutuhan dasar, peningkatan kualitas sumber daya manusia, perlindungan lingkungan, serta terwujudnya keadilan sosial sebagai bagian dari tujuan maqashid syariah (Ariffin & Sitabuana, 2022). Kesenjangan pendapatan antara kelompok masyarakat berpendapatan tinggi dan rendah yang masih lebar menunjukkan bahwa upaya mewujudkan keadilan dan kesejahteraan sosial belum berjalan optimal, sehingga diperlukan peran kebijakan dan sistem distribusi yang lebih adil untuk menekan ketimpangan pendapatan sesuai dengan tujuan pembangunan yang berkeadilan.

Pengaruh PDRB Per Kapita Terhadap Ketimpangan Pendapatan Daerah

Teori Kuznets menjelaskan bahwa proses pembangunan dapat memunculkan ketimpangan pendapatan yang digambarkan melalui pola U terbalik, di mana ketimpangan meningkat pada tahap awal pertumbuhan dan menurun ketika pendapatan per kapita naik (Sibatuara & Hutabarat, 2025). Hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi menjadi perhatian penting, khususnya di negara berkembang, dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya, teori lingkaran setan kemiskinan dari Nurkse bahwa kemiskinan terjadi akibat rendahnya modal, produktivitas, dan pendapatan, yang kemudian membatasi tabungan serta investasi dan membuat kondisi keterbelakangan terus berulang. Pemenuhan hak dasar seperti pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, serta rasa aman menjadi kunci untuk keluar dari kondisi tersebut (Farhan & Sugianto, 2022).

Penelitian Yerna Wiza dan Hesi Eka Puteri (2023) menggunakan data provinsi tahun 2017 menunjukkan bahwa PDRB per kapita berpengaruh negatif dan signifikan terhadap disparitas pendapatan, sehingga peningkatannya dapat mengurangi ketimpangan antar wilayah. Hasil serupa diperoleh Yulikasari dan M. Afdal Samsuddin (2025) melalui analisis pengaruh PDRB per kapita terhadap ketimpangan antar provinsi, menegaskan bahwa peningkatan pendapatan per kapita berpotensi menurunkan ketimpangan di Indonesia.

H1: PDRB per kapita berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Ketimpangan Pendapatan Daerah

Pengaruh Tingkat Pengangguran Terbuka Terhadap Ketimpangan Pendapatan Daerah

Menurut teori Keynes, pengangguran muncul akibat rendahnya permintaan agregat, sehingga intervensi pemerintah diperlukan untuk menjaga permintaan, menyediakan lapangan kerja, dan mengurangi dampak negatif terhadap kesejahteraan masyarakat (Fahmi, 2022). Menurut Kuncoro, pengangguran terbuka terjadi akibat perpindahan penduduk ke daerah dengan perekonomian lebih maju, di mana kesempatan kerja tidak sebanding dengan jumlah tenaga kerja yang masuk. Akibatnya, sebagian besar angkatan kerja tetap menganggur dan memperlebar ketimpangan pendapatan. Sebaliknya, jika pertumbuhan daerah diimbangi dengan penyediaan kesempatan kerja yang memadai, perekonomian wilayah tersebut akan berkembang.

Berdasarkan penelitian terdahulu oleh Ratiarum Fatika Yoertiara dan Nur Feriyanto (2022) menunjukkan bahwa tingkat pengangguran terbuka berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan di provinsi-provinsi Pulau Jawa, karena masih banyak tenaga kerja yang belum terserap dan tidak produktif. Hasil serupa ditemukan oleh Neva Rodiyatul Sholikhah dan Niniek Imaningsih (2022) yang menegaskan bahwa rendahnya penyerapan tenaga kerja memperbesar kesenjangan pendapatan antar kelompok masyarakat.

H2: Tingkat Pengangguran Terbuka berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan daerah

Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Ketimpangan Pendapatan Daerah

Todaro menjelaskan bahwa *human capital* meliputi pendidikan dan kesehatan yang memengaruhi kemampuan serta produktivitas individu. Pendidikan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan sekaligus membentuk kepedulian terhadap kesehatan, sedangkan kondisi kesehatan yang baik diperlukan untuk mendukung produktivitas (Retnowati & Zumaeroh, 2023). Mankiw menyatakan bahwa modal manusia berperan penting dalam penyerapan teknologi dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Dalam pembangunan manusia, pemerataan pendidikan dasar dan peningkatan kualitas hidup menjadi unsur penting. Nilai Indeks Pembangunan Manusia yang tinggi menunjukkan pencapaian yang lebih baik pada aspek harapan hidup, pendidikan, dan daya beli masyarakat (Farhan & Sugianto, 2022).

Penelitian terdahulu oleh Zusanti *et al* (2020) menemukan bahwa IPM berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan di Pulau Jawa, sehingga peningkatan kualitas pembangunan manusia berkaitan dengan penurunan kesenjangan antarwilayah. Makipantung *et al* (2023) juga menemukan hubungan negatif antara IPM dan ketimpangan pendapatan di Kabupaten Minahasa. Temuan tersebut memperkuat bahwa peningkatan pembangunan manusia berperan dalam menekan ketimpangan ekonomi.

H3: Indeks Pembangunan Manusia berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Ketimpangan Pendapatan Daerah

Pengaruh PDRB Per Kapita, Tingkat Pengangguran Terbuka, Dan Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Ketimpangan Pendapatan Daerah

Teori ekonomi pembangunan Todaro dan Smith menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi melalui PDRB per kapita, tingkat pengangguran terbuka, serta kualitas sumber daya manusia melalui IPM saling terkait untuk mengurangi ketimpangan pendapatan, karena pertumbuhan tanpa distribusi sumber daya dan kesempatan kerja merata justru memperlebar kesenjangan antarwilayah.

Penelitian terdahulu yang relevan menunjukkan bahwa kualitas sumber daya manusia, pertumbuhan ekonomi, dan tingkat pengangguran memiliki keterkaitan dengan ketimpangan

pendapatan daerah. Penelitian oleh Ike Sugiarti dan Rendra Erdkhadifa (2023) menjelaskan bahwa kualitas sumber daya manusia, termasuk Indeks Pembangunan Manusia, pertumbuhan ekonomi, serta tingkat pengangguran terbuka berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan pada kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur. Berdasarkan temuan tersebut, hipotesis dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

H4: PDRB Per Kapita, Tingkat Pengangguran Terbuka, Dan Indeks Pembangunan Manusia secara simultan memiliki pengaruh signifikan terhadap Ketimpangan Pendapatan Daerah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif untuk menganalisis pengaruh PDRB per kapita, tingkat pengangguran terbuka, dan Indeks Pembangunan Manusia terhadap ketimpangan pendapatan daerah dalam perspektif ekonomi Islam pada periode 2018–2024. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana ketiga variabel independen tersebut memengaruhi ketimpangan pendapatan di provinsi-provinsi Pulau Sumatera. Sampel penelitian mencakup 10 provinsi di Pulau Sumatera dengan data sekunder tahunan berupa data panel yang menggabungkan data *time series* dan *cross section*, diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) melalui situs resmi www.bps.go.id.

Populasi penelitian meliputi seluruh data PDRB per kapita, tingkat pengangguran terbuka, Indeks Pembangunan Manusia, dan ketimpangan pendapatan (Gini ratio) di 10 provinsi selama 2018–2024. Penelitian ini menggunakan metode *sampling jenuh*, sehingga seluruh populasi dijadikan sampel. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi dari publikasi resmi BPS, dan data diolah menggunakan Microsoft Excel serta EViews 13 untuk keperluan analisis lebih lanjut.

Analisis data dilakukan dengan regresi data panel untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Persamaan regresi yang digunakan adalah:

$$Y_{it} = \beta_0 + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + \beta_3 X_{3it} + \varepsilon_{it}$$

Keterangan:

Y	: Ketimpangan Pendapatan
β_0	: Konstanta
$\beta_1, \beta_2, \beta_3$: Koefisien Variabel Independen
X1	: PDRB Per Kapita
X2	: Tingkat Pengangguran Terbuka
X3	: Indeks Pembangunan Manusia
ε	: Koefisien <i>Error</i>
i	: 10 provinsi di Pulau Sumatera (data <i>cross section</i>)
t	: Periode waktu penelitian yaitu tahun 2018-2024 (data <i>time series</i>)

Variabel Terikat (Dependen)

Ketimpangan pendapatan adalah kondisi distribusi pendapatan yang tidak merata antarindividu atau rumah tangga (Gurusinga et al., 2022). Dalam penelitian ini, ketimpangan

diukur menggunakan koefisien gini (gini ratio) dengan rentang nilai 0-1, di mana nilai yang lebih kecil menunjukkan distribusi pendapatan yang lebih merata, sedangkan nilai yang lebih besar mencerminkan ketimpangan pendapatan yang semakin tinggi (Yunus et al., 2021). Perhitungan Indeks Gini dapat dilakukan melalui cara berikut:

$$GR = 1 - \sum fi (Y_i + Y_{i-1})$$

Keterangan:

Fi : Total kumulatif pemereoleh pendapatan dalam golongan ke-i

Yi : Total kumulatif pemereoleh pendapatan dalam golongan ke-i

Variabel Bebas (Independen)

Penelitian ini menggunakan tiga variabel independen, yaitu PDRB per kapita, tingkat pengangguran terbuka, dan Indeks Pembangunan Manusia.

PDRB Per Kapita

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita merupakan indikator keberhasilan pembangunan ekonomi wilayah yang mencerminkan nilai bersih barang dan jasa akhir, serta digunakan untuk menggambarkan rata-rata pendapatan penduduk dan tingkat kesejahteraan ekonomi di suatu daerah (Wiza & Puteri, 2023). Angka ini menggambarkan kemampuan daerah dalam mengelola sumber daya, di mana perbedaan potensi sumber daya dan faktor produksi membuat PDRB antarwilayah tidak sama. Umumnya, daerah dengan PDRB per kapita tinggi memiliki ekonomi lebih kuat dan kemiskinan lebih rendah, sementara wilayah dengan PDRB per kapita rendah menghadapi hambatan pembangunan lebih besar dan tingkat kemiskinan lebih tinggi (Sipahutar & Nasution, 2023). Dengan perhitungan menggunakan rumus PDRB per kapita:

$$\frac{\text{Total PDRB}}{\text{Jumlah Penduduk}}$$

Tingkat Pengangguran Terbuka

Pengangguran adalah kondisi angkatan kerja yang tidak memiliki pekerjaan dan sedang mencarinya (Salsabila et al., 2022). Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), pengangguran juga mencakup mereka yang menunggu panggilan kerja, mempersiapkan usaha baru, atau telah diterima bekerja namun belum mulai bekerja (Badan Pusat Statistik, 2020). Rumus Tingkat Pengangguran Terbuka:

$$\frac{\text{Jumlah Pengangguran} \times 100\%}{\text{Jumlah Angkatan Kerja}}$$

Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang diperkenalkan UNDP dalam *Human Development Report* 1996 digunakan untuk menilai kualitas hidup melalui komponen kesehatan, pendidikan, dan standar hidup layak (Nugraha et al., 2025). Nilainya berada pada rentang 0–100,

dengan angka lebih tinggi mencerminkan capaian pembangunan manusia yang lebih baik. Indeks ini berperan sebagai indikator utama untuk menilai keberhasilan suatu wilayah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduknya secara menyeluruh (Badan Pusat Statistik, 2020). Rumus Indeks Pembangunan Manusia:

$$IPM = \sqrt[3]{I_{kesehatan} \times I_{pendidikan} \times I_{pengeluaran}} \times 100$$

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Analisis Statistik Deskriptif

Berdasarkan Tabel 3, hasil analisis statistik deskriptif menunjukkan bahwa variabel ketimpangan pendapatan (Y) memiliki nilai mean 0,314843, nilai median 0,321000, nilai maksimum 0,357000, nilai minimum 0,235000, dan standar deviasi 0,026202. Variabel PDRB per kapita (X1) memiliki mean 43.323,49, median 36.990, nilai maksimum 96.157, nilai minimum 22.495, dan standar deviasi 21.052,75. Variabel tingkat pengangguran terbuka (X2) memiliki mean 5,276143, median 5,060000, nilai maksimum 10,34000, nilai minimum 3,110000, dan standar deviasi 1,443590. Adapun variabel Indeks Pembangunan Manusia (X3) memiliki mean 72,39457, median 72,17000, nilai maksimum 77,97000, nilai minimum 69,02000, dan standar deviasi 1,804334.

Estimasi Data Panel

Uji Chow

Uji chow dilakukan untuk menentukan model terbaik antara *Common Effect Model* (CEM) dengan *Fixed Effect Model* (FEM). Berdasarkan hasil *uji chow*, seperti yang ditunjukkan pada tabel 4, diperoleh nilai probabilitas *cross-section Chi-square* sebesar $0,0000 < 0,05$, sehingga dapat disimpulkan bahwa model yang paling sesuai adalah *Fixed Effect Model* (FEM).

Uji Hausman

Uji hausman dilakukan untuk memilih model terbaik antara *Random Effect Model* (REM) dengan *Fixed Effect Model* (FEM). Berdasarkan pengujian *uji hausman*, seperti yang ditunjukkan pada tabel 5 diperoleh *cross-section Random* dengan nilai probabilitas $0,7790 > 0,05$. Dapat disimpulkan bahwa model terbaik yang terpilih adalah *Random Effect Model* (REM) sehingga perlu dilanjutkan dengan *Uji Lagrange Multiplier* (LM) untuk memastikan kecocokan model.

Uji Lagrange Multiplier (LM)

Uji Lagrange Multiplier digunakan untuk menentukan model estimasi yang paling sesuai antara *Random Effect Model* dan *Common Effect Model*. Berdasarkan tabel 6 hasil *uji Lagrange Multiplier* (LM) menunjukkan nilai probabilitas *Breusch-Pagan* untuk *cross-section* sebesar $0,0000 < 0,05$. Hal ini menunjukkan adanya efek random yang signifikan antar unit *cross-section*, sehingga model yang paling tepat digunakan adalah *Random Effect Model* (REM)

untuk menganalisis pengaruh PDRB per kapita, Tingkat Pengangguran Terbuka, dan Indeks Pembangunan Manusia terhadap Ketimpangan Pendapatan. Berdasarkan hasil estimasi *Random Effect Model* (REM), maka diperoleh persamaan sebagai berikut:

$$Y = 0.786335961565 + 0.000656865411246 * X1 - 0.00239905421605 * X2 - 0.00673107169917 * X3 + [CX=R]$$

Adapun penjelasannya adalah sebagai berikut:

1. Nilai konstanta sebesar 0.786335961565 artinya tanpa adanya variabel PDRB per kapita, tingkat pengangguran terbuka, dan indeks pembangunan manusia, maka ketimpangan pendapatan daerah akan mengalami kenaikan sebesar 0.786335961565.
2. Nilai koefisien beta variabel PDRB per kapita (X_1) sebesar 0.000656865411246. Jika variabel lain dianggap konstan dan PDRB per kapita meningkat 1%, maka ketimpangan pendapatan daerah (Y) akan meningkat sebesar 0.000656865411246. Begitu juga sebaliknya, jika PDRB per kapita menurun 1%, maka ketimpangan pendapatan daerah akan menurun dengan besaran yang sama.
3. Nilai koefisien beta variabel Tingkat Pengangguran Terbuka (X_2) sebesar -0.00239905421605. Jika variabel lain konstan dan tingkat pengangguran terbuka meningkat 1%, maka ketimpangan pendapatan daerah (Y) akan menurun sebesar 0.00239905421605. Sebaliknya, jika tingkat pengangguran terbuka menurun 1%, ketimpangan pendapatan daerah akan meningkat sebesar nilai tersebut.
4. Nilai koefisien beta variabel Indeks Pembangunan Manusia (X_3) sebesar -0.00673107169917. Jika variabel lain konstan dan IPM meningkat 1%, maka ketimpangan pendapatan daerah (Y) akan menurun sebesar 0.00673107169917. Sebaliknya, penurunan IPM sebesar 1% akan meningkatkan ketimpangan pendapatan dengan besaran yang sama.

Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik dilakukan untuk memastikan bahwa model regresi yang digunakan memenuhi kelayakan statistik sehingga hasil estimasi dapat diinterpretasikan secara tepat. Pada regresi data panel, pengujian asumsi klasik disesuaikan dengan karakteristik data dan metode estimasi yang digunakan.

Pada penelitian ini, pengujian asumsi klasik dilakukan pada model yang terpilih melalui uji pemilihan model data panel, yaitu *Random Effect Model* (REM) dengan pengujian terhadap multikolinearitas dan heteroskedastisitas. Uji multikolinearitas bertujuan untuk menilai adanya korelasi tinggi antar variabel independen, yang dapat dideteksi melalui nilai korelasi antar variabel bebas (Patiran, 2021). Sedangkan uji heteroskedastisitas, yang biasanya diterapkan pada data silang (*cross-section*), tetap dilakukan dalam penelitian ini untuk memastikan variansi residual model berada dalam batas yang wajar.

Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas dilakukan untuk mengetahui adanya korelasi tinggi antar variabel independent (Pramasha & Restianita, 2024). Nilai korelasi antar variabel independen $< 0,80$ sehingga model dinyatakan bebas dari multikolinearitas.

Berdasarkan tabel 7, hasil pengujian menunjukkan bahwa koefisien korelasi antara X1 dan X2 sebesar $0,45 < 0,80$, antara X1 dan X3 sebesar $0,70 < 0,80$, serta antara X2 dan X3 sebesar $0,56 < 0,80$. Dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat multikolinearitas pada variabel independen dalam model regresi ini.

Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas dilakukan untuk melihat adanya gejala heteroskedastisitas pada model, yaitu perbedaan varian residual. Tabel 8 menunjukkan bahwa nilai probabilitas *chi-square* sebesar $0.0907 > 0,05$. Dapat disimpulkan bahwa model regresi bebas dari heteroskedastisitas.

Uji Hipotesis

Uji Parsial (Uji t)

Uji t bertujuan mengukur pengaruh parsial masing-masing variabel independen terhadap variasi variabel dependen. Berdasarkan hasil uji t yang disajikan pada tabel 9, diperoleh hasil sebagai berikut:

1. Hasil uji t pada variabel PDRB per Kapita (X1) memiliki nilai t hitung sebesar $1.577093 < t$ tabel 1.99656 dan nilai signifikan $0.1196 > 0.05$, maka H_0 diterima dan H_1 ditolak. Dengan demikian secara parsial variabel PDRB per Kapita berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap ketimpangan pendapatan daerah di Pulau Sumatera.
2. Hasil uji t pada variabel Tingkat Pengangguran Terbuka (X2) memiliki nilai t hitung sebesar $-1.349523 < t$ tabel 1.99656 dan nilai signifikan $0.1818 > 0.05$, maka H_0 diterima dan H_1 ditolak. Secara parsial variabel Tingkat Pengangguran berpengaruh negatif tetapi tidak signifikan terhadap ketimpangan pendapatan daerah di Pulau Sumatera.
3. Hasil uji t pada variabel Indeks Pembangunan Manusia (X3) memiliki nilai t hitung sebesar $-3.929378 > t$ tabel 1.99656 dan nilai signifikan $0.0002 < 0.05$, maka H_0 ditolak dan H_1 diterima. Secara parsial variabel IPM berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan daerah di Pulau Sumatera.

Uji Simultan (Uji f)

Uji F digunakan untuk menguji pengaruh secara simultan seluruh variabel independen terhadap variabel dependen. Berdasarkan hasil uji f pada tabel 10 menunjukkan nilai f hitung sebesar $5,992760$ lebih besar dari f tabel sebesar $2,74$ dan nilai Probabilitas sebesar $0,001125 < 0,05$. Artinya PDRB per Kapita, Tingkat Pengangguran Terbuka, dan Indeks Pembangunan

Manusia secara simultan berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan pendapatan daerah di provinsi Sumatera periode 2018–2024.

Uji Koefisien Determinasi (R²)

Koefisien determinasi digunakan untuk menunjukkan kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen. Berdasarkan tabel 11, hasil pengujian pada model regresi panel dengan menggunakan *Random Effect Model* (REM), diperoleh nilai *R-squared* sebesar 0.214082. Hal ini menunjukkan bahwa variabel PDRB per kapita (X1), tingkat pengangguran terbuka (X2), dan Indeks Pembangunan Manusia (X3) secara simultan dapat menjelaskan ketimpangan pendapatan daerah di provinsi Sumatera sebesar 21,4%, sedangkan sisanya sebesar 78,6% dijelaskan oleh faktor-faktor lain yang tidak termasuk dalam model penelitian ini.

Pembahasan

Pengaruh PDRB Per Kapita terhadap Ketimpangan Pendapatan Daerah

Variabel PDRB per kapita (X1) memiliki koefisien 0,000657 dengan probabilitas $0,1196 > 0,05$, sehingga pengaruhnya positif tetapi tidak signifikan, maka H₀ diterima dan H₁ ditolak. Hasil ini menunjukkan bahwa peningkatan pendapatan rata-rata belum mampu mendorong perubahan distribusi pendapatan antar daerah di Pulau Sumatera. Menurut Todaro (2003) ketimpangan pendapatan mencerminkan perbedaan tingkat pendapatan relatif antara kelompok masyarakat berpenghasilan tinggi dan berpenghasilan rendah, yang tidak hanya terjadi antarnegara, tetapi juga antarwilayah dalam satu negara. Dalam konteks regional, daerah dengan tingkat PDRB per kapita yang lebih tinggi cenderung memiliki rata-rata pendapatan yang lebih besar dibandingkan daerah dengan PDRB per kapita yang lebih rendah. Perbedaan capaian pendapatan tersebut menunjukkan adanya ketimpangan antarwilayah yang dipengaruhi oleh variasi potensi ekonomi, struktur sektor unggulan, serta kemampuan masing-masing daerah dalam mengelola dan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki.

Ketidaksignifikanan pengaruh PDRB per kapita dalam penelitian ini menunjukkan bahwa pendapatan rata-rata belum sepenuhnya mampu menjelaskan perbedaan tingkat ketimpangan pendapatan antar daerah. Peningkatan PDRB per kapita dapat terjadi akibat kenaikan pendapatan pada sektor atau wilayah tertentu tanpa diikuti oleh peningkatan kelompok berpendapatan rendah maupun daerah tertinggal. Dalam kondisi tersebut, pendapatan rata-rata meningkat, namun struktur ketimpangan yang telah terbentuk sebelumnya relatif tidak mengalami perubahan. Akibatnya, kenaikan PDRB per kapita belum menunjukkan pengaruh yang berarti dalam mengubah pola ketimpangan pendapatan. Selain itu, ketimpangan antarprovinsi di Pulau Sumatera yang ditandai oleh perbedaan basis ekonomi, kualitas sumber daya manusia, dan tingkat produktivitas menyebabkan dampak pertumbuhan pendapatan tidak

terdistribusi secara merata. Oleh karena itu, meskipun PDRB per kapita mengalami peningkatan, pengaruhnya terhadap ketimpangan pendapatan belum tercermin secara nyata.

Secara teoritis, temuan ini sejalan dengan pandangan Todaro dan Smith yang menegaskan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak secara otomatis menghasilkan pemerataan pendapatan. Apabila pertumbuhan ekonomi belum diikuti oleh pemerataan manfaat antar kelompok masyarakat dan wilayah, peningkatan PDRB per kapita pada dasarnya mencerminkan pertumbuhan pendapatan rata-rata, bukan perbaikan distribusi pendapatan. Temuan ini sejalan dengan hasil penelitian Monikasari *et al* (2024) yang menunjukkan pengaruh simultan PDRB signifikan, namun pengaruh parsialnya tidak. Sehingga mengindikasikan bahwa pertumbuhan pendapatan di Sumatera belum cukup merata untuk menurunkan ketimpangan secara nyata.

Pengaruh Tingkat Pengangguran Terbuka terhadap Ketimpangan Pendapatan Daerah

Variabel tingkat pengangguran terbuka (X_2) memiliki koefisien $-0,002399$ dengan probabilitas $0,1818 > 0,05$, sehingga pengaruhnya negatif tetapi tidak signifikan, maka H_0 diterima dan H_2 ditolak. Temuan ini menunjukkan bahwa perubahan tingkat pengangguran terbuka di Pulau Sumatera belum cukup kuat untuk mendorong perubahan ketimpangan pendapatan secara signifikan. Artinya, fluktuasi jumlah penganggur tidak secara langsung berpengaruh terhadap perubahan distribusi pendapatan antar kelompok masyarakat. Menurut teori Keynes, peningkatan pengangguran terjadi akibat rendahnya permintaan agregat yang berpotensi menurunkan kesejahteraan masyarakat. Dalam kondisi tersebut, kebijakan pemerintah diperlukan untuk menstabilkan perekonomian melalui penguatan daya beli dan perluasan kesempatan kerja. Namun, dalam kondisi perekonomian Pulau Sumatera, mekanisme tersebut tidak berujung pada perubahan ketimpangan pendapatan yang signifikan, karena dominannya sektor informal serta adanya kebijakan pemerintah yang berfungsi menjaga stabilitas pendapatan masyarakat.

Kondisi ini dapat dijelaskan oleh struktur ketenagakerjaan yang lebih banyak berada di sektor informal. Ketika sebagian penduduk kehilangan pekerjaan di sektor formal, mereka cenderung tidak berada lama dalam status menganggur, melainkan beralih ke sektor informal. Meskipun pendapatan yang diperoleh relatif rendah, pendapatan tersebut cenderung stabil, sehingga perubahan tingkat pengangguran terbuka tidak secara langsung memengaruhi distribusi pendapatan. Selain itu, intervensi pemerintah melalui bantuan sosial, program pelatihan kerja, serta upaya menjaga daya beli masyarakat turut meredam dampak pengangguran terhadap ketimpangan pendapatan. Oleh karena itu, peningkatan atau penurunan tingkat pengangguran terbuka tidak secara langsung diikuti oleh perubahan ketimpangan pendapatan daerah. Hasil penelitian ini sejalan dengan temuan Istikharoh *et al* (2020) dan Ersad

et al (2022) menunjukkan bahwa tingkat pengangguran terbuka memiliki hubungan negatif tetapi tidak signifikan terhadap ketimpangan pendapatan.

Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia terhadap Ketimpangan Pendapatan Daerah

Variabel Indeks Pembangunan Manusia (X_3) memiliki koefisien $-0,006731$ dengan probabilitas $0,0002 < 0,05$, sehingga pengaruhnya negatif dan signifikan, maka H_0 ditolak dan H_3 diterima. Secara parsial, peningkatan IPM berperan dalam menurunkan ketimpangan pendapatan daerah di Pulau Sumatera. Temuan ini mengindikasikan bahwa peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan, kesehatan, dan standar hidup yang lebih baik berperan dalam menurunkan ketimpangan pendapatan antar daerah. Berdasarkan teori *human capital*, pendidikan dan kesehatan meningkatkan kemampuan, keterampilan, serta produktivitas individu, sehingga pekerja dengan tingkat pendidikan dan kondisi kesehatan yang lebih baik cenderung memperoleh upah dan peluang kerja lebih tinggi dibandingkan kelompok dengan pendidikan rendah. Dengan adanya peningkatan penghasilan tersebut, masyarakat memiliki kapasitas ekonomi yang lebih besar, yang pada akhirnya menurunkan ketimpangan pendapatan. Selain itu, pemerataan akses pendidikan dan layanan kesehatan berperan dalam meningkatkan kapasitas dan pendapatan seluruh kelompok masyarakat, sehingga mendukung terciptanya pemerataan ekonomi.

Berdasarkan penelitian terdahulu, variabel Indeks Pembangunan Manusia terbukti berpengaruh terhadap ketimpangan wilayah. Zusanti *et al* (2020) menemukan Indeks Pembangunan Manusia memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan wilayah di Pulau Jawa periode 2010–2018, yang mengindikasikan peningkatan kualitas pembangunan manusia menekan kesenjangan antarwilayah.

Pengaruh PDRB Per Kapita, Tingkat Pengangguran Terbuka, dan Indeks Pembangunan Manusia terhadap Ketimpangan Pendapatan Daerah

Nilai F hitung sebesar $5,992760$ dengan probabilitas $0,001125 < 0,05$ menunjukkan bahwa PDRB Per Kapita, Tingkat Pengangguran Terbuka, dan Indeks Pembangunan Manusia secara simultan berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan pendapatan daerah di Provinsi Pulau Sumatera, maka H_0 ditolak dan H_4 diterima. Pengaruh signifikan ini dapat dijelaskan melalui teori ekonomi pembangunan menurut Todaro dan Smith (2006), yang menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi, yang diukur melalui PDRB per kapita, berpotensi meningkatkan pendapatan masyarakat, namun pemerataan hasil pembangunan sangat bergantung pada kemampuan daerah dalam mendistribusikan sumber daya dan menyediakan kesempatan kerja secara merata. Pertumbuhan ekonomi tanpa distribusi yang adil justru dapat meningkatkan ketimpangan karena sebagian masyarakat memperoleh manfaat lebih besar dibanding kelompok lain. Di sisi lain, tingkat pengangguran terbuka menjadi indikator penting karena tingginya

pengangguran menunjukkan sebagian penduduk produktif tidak mendapatkan pekerjaan layak sehingga pendapatan tidak merata. Kemampuan daerah dalam menyerap tenaga kerja efektif akan menambah jumlah masyarakat yang memperoleh penghasilan, sehingga menurunkan kesenjangan, Temuan ini sejalan dengan penelitian Ike Sugiarti dan Rendra Erdkhadifa (2023) yang menemukan bahwa faktor kualitas sumber daya manusia, yang tercermin melalui Indeks Pembangunan Manusia, serta tingkat pengangguran terbuka berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur.

Kualitas sumber daya manusia melalui Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berperan penting dalam mengurangi ketimpangan pendapatan karena SDM yang baik meningkatkan produktivitas dan akses terhadap peluang ekonomi. Kombinasi pertumbuhan ekonomi, kesempatan kerja yang memadai dan kualitas SDM yang tinggi saling mendukung pemerataan pendapatan. Dengan demikian, peningkatan PDRB per kapita harus diiringi kebijakan yang mendorong pemerataan kesempatan kerja dan peningkatan SDM agar manfaat pertumbuhan ekonomi dapat dirasakan secara merata.

Perspektif Ekonomi Islam tentang PDRB Per Kapita, Tingkat Pengangguran Terbuka, dan Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Ketimpangan Pendapatan Daerah

Agama memegang peran penting dalam membentuk tatanan sosial dan ekonomi masyarakat, termasuk dalam mengurangi ketimpangan pendapatan. Dalam Islam, distribusi kekayaan diarahkan untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar setiap individu tanpa mengurangi hak kepemilikan pribadi. Prinsip *maqashid al-syariah* menekankan kemaslahatan manusia melalui pemenuhan kebutuhan primer, sekunder, dan tersier, sehingga distribusi dan redistribusi harta dilakukan secara adil dan terarah (Lubis, 2020). Prinsip ini sejalan dengan pedoman Al-Qur'an surah At-Taubah ayat 60:

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلُودِ فَؤُؤُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرْمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ ۖ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu’alaff yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.” (Q.S. At Taubah [9]: 60)

Ayat ini menegaskan zakat sebagai instrumen distribusi dan redistribusi kekayaan yang bertujuan mengurangi kesenjangan sosial. Dengan menyalurkan harta kepada kelompok yang membutuhkan, zakat membantu menjaga pemerataan kesejahteraan dan menjadi mekanisme penting dalam mengurangi ketimpangan pendapatan dalam perspektif ekonomi Islam.

KESIMPULAN

Kesimpulan penelitian ini menunjukkan bahwa PDRB per kapita, tingkat pengangguran terbuka, dan Indeks Pembangunan Manusia memiliki pengaruh yang berbeda terhadap ketimpangan pendapatan daerah di Provinsi Sumatera. PDRB per kapita memiliki hubungan positif tetapi tidak signifikan, menandakan bahwa peningkatan pendapatan per kapita pada tahap awal pembangunan belum sepenuhnya menurunkan ketimpangan. Tingkat pengangguran terbuka memiliki pengaruh negatif namun tidak signifikan, menunjukkan bahwa fluktuasi pengangguran tidak berdampak langsung terhadap distribusi pendapatan. Sebaliknya, Indeks Pembangunan Manusia berpengaruh negatif dan signifikan, yang menandakan bahwa peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan, kesehatan, dan standar hidup yang lebih efektif menekan kesenjangan pendapatan antar daerah. Secara simultan, ketiga variabel terbukti berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan daerah pada periode 2018-2024. Upaya yang dapat dilakukan dari penelitian ini adalah peran pemerintah dalam memperkuat sektor produktif yang menyerap tenaga kerja, meningkatkan kapasitas usaha masyarakat, serta memperluas pemerataan pembangunan dan kualitas pendidikan serta kesehatan untuk mendukung pemerataan pendapatan. Penelitian selanjutnya disarankan menambah variabel lain seperti investasi, distribusi modal, dan infrastruktur, serta memperluas cakupan wilayah penelitian agar memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai faktor-faktor yang memengaruhi ketimpangan pendapatan daerah.

DAFTAR PUSTAKA

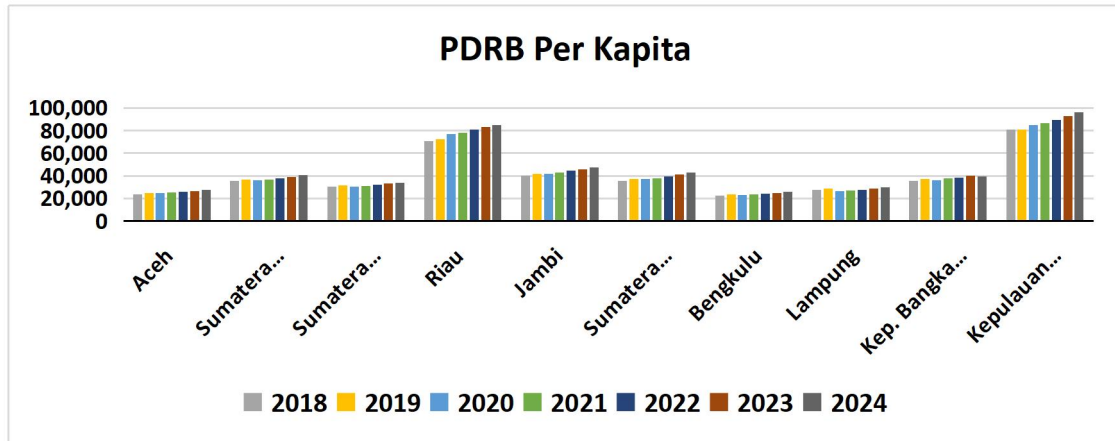
- Agustia, D., Anita, S. Y., & Hasimi, D. M. (2025). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Indeks Pembangunan Manusia dan Kemiskinan Terhadap Tingkat Pengangguran di 6 Provinsi Pulau Sulawesi Ditinjau dalam Perspektif Ekonomi Islam Tahun 2019-2024. *Jurnal Ekonomi Dan Manajemen*, 5(1), 175–191.
- Arbiansa, I., Bahtiar, M. Y., & Sisdianto, E. (2025). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Ketimpangan Ekonomi Di Indonesia Dalam Perspektif Ekonomi Islam. *JIMEA | Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, Dan Akuntansi)*, 9(3), 1670–1691. <https://doi.org/https://doi.org/10.31955/mea.v9i3.6469>
- Ariffin, M., & Sitabuana, T. H. (2022). Sistem Perpajakan Di Indonesia. *Serina IV Untar*, 28, 523–534. <https://doi.org/https://doi.org/10.24912/pserina.v2i1.19631>
- Badan Pusat Statistik. (2020). *Indeks Pembangunan Manusia*.
- Badan Pusat Statistik. (2020). *Statistik Ketenagakerjaan Kabupaten Situbondo Tahun 2020*.
- Badan Pusat Statistik. (2021). *Booklet Survei Angkatan Kerja Nasional*.
- Barabasi, H. A. Al, & Atmanti, H. D. (2025). Analisis Ketimpangan Pendapatan di Indonesia Periode 2017- 2023 (Studi kasus 34 Provinsi di Indonesia). *Jurnal Ekonomi Bisnis Dan Manajemen*, 3(1), 221–234.
- Cherend, A. S., Rorong, I. P. F., & Sumual, J. I. (2023). Analisis Ketimpangan Pendapatan Dan Kualitas Pertumbuhan Ekonomi Empat Kota Di Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 23(4), 1–12.
- Ersad, M. E., Amir, A., & Zulgani. (2022). Dampak Ipm, Tingkat Pengangguran Dan Tingkat Kemiskinan Terhadap Ketimpangan Pendapatan Di Sumatera Bagian Selatan. *Jurnal Paradigma Ekonomika*, 17(2), 20–38.
- Ersad, M. E., Amir, A., & Zulgani, Z. (2022). Dampak IPM, tingkat pengangguran dan tingkat kemiskinan terhadap ketimpangan pendapatan di Sumatera Bagian Selatan. *Jurnal*

- Paradigma Ekonomika*, 17(2), 425–438. <https://doi.org/10.22437/jpe.v17i2.15614>
- Etika, C., Fu'ad, Z., Rachmania, & Alam, H. N. (2025). Pengaruh Kesetaraan Gender , Tenaga Kerja , Dan Tingkat Upah Minimum Provinsi Terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Di Pulau Sumatera Ditinjau Dalam Perspektif Ekonomi Islam. *J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah*, 4(3), 3767–3779.
- Fahmi, M. P. (2022). Analysis of Factors Affecting Educated Unemployment in Pekanbaru City. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 2(2), 76–87.
- Farhan, M., & Sugianto, S. (2022). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Ketimpangan Pendapatan Di Pulau Jawa. *Sibatik Journal: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan*, 1(4), 243–258. <https://doi.org/10.54443/sibatik.v1i4.29>
- Gurusinga, E. B., Engka, D. S. M., & Tolosang, K. D. (2022). Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi Elverbinta Br Gurusinga Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi Elverbinta Br Gurusinga. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 22(7), 37–48.
- Imaniah, S., Madnasir, & Supriyaningsih, O. (2024). Analisis Disparitas Pendapatan Dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhinya Di Indonesia Ditinjau Dari Ekonomi Islam. *IJEN: Indonesian Journal of Economy and Education Economy*, 02(02), 459–469.
- Istikhharoh, Whinar Prijanto, ko J., & Destiningsih, R. (2020). Analisis Pengaruh Tingkat Pendidikan , Upah Minimum Dan Tingkat Pengangguran Terhadap Ketimpangan Pendapatan Di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2008 -2018. *Directory Journal of Economic*, 2(1), 109–125.
- Kuncoro, M. (2006). *Ekonomika pembangunan teori, masalah, dam kebijakan*. UPP STIM YKPN Yogyakarta.
- Lubis, A. T. (2020). Distribusi Pendapatan Dalam Perspektif Islam. *Journal Islamic Banking and Finance*, 1(1), 53–67.
- Makipantung, R. O., Walewangko, E. N., & Niode, A. O. (2023). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Dan Indeks Pembangunan Manusia (Ipm) Terhadap Ketimpangan Distribusi Pendapatan Di Wilayah Kabupaten Minahasa Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 23(7), 157–168.
- Manalu, M. E., Siahaan, K. S. A., & Suharianto, J. (2025). Analisis Dampak Jumlah Penduduk , Pengangguran , dan IPM terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara 2001-2021. *Jurnal Riset Dan Publikasi Ilmu Ekonomi*, 3(2), 62–82.
- Monikasari, Devi, Y., & Saefurrohman, G. U. (2024). Analisis Pengaruh Pdrb , Investasi & Pad Terhadap Ketimpangan Distribusi Pendapatan Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Provinsi Lampung Tahun 2018-2023) Ketimpangan Distribusi Pendapatan Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Provinsi Lampu. *Jurnal Media Akademik (JMA)*, 2(11).
- Naflah Azmi Nur Aisyah, & Sishadiyati. (2024). Dinamika Ekonomi Surabaya Raya: Studi tentang Dampak PDRB Perkapita, Tingkat Kemiskinan, dan Upah Minimum terhadap Ketimpangan Pendapatan. *Jurnal Kajian Pendidikan Ekonomi Dan Ilmu Ekonomi*, 09(01), 521–531.
- Nugraha, G., Rahayu, D. S., & Aso Sukarso. (2025). Kemiskinan Dan Partisipasi Tenaga Kerja: Tantangan Dalam Meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia Di Indonesia. *JIMEA | Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, Dan Akuntansi)*, 9(1), 1287–1303.
- Octavia, H. S. (2021). Analisis Pengaruh Kemiskinan, Tingkat Pengangguran Terbuka dan Investasi Terhadap Ketimpangan Pendapatan pada Provinsi DIY tahun 2009-2019. *Jurnal Ilmiah*, 11.
- Patiran, C. L. (2021). Pengaruh Karakteristik Perusahaan Dan Atribut Dewan Komisaris Terhadap Kebijakan Dividen Kas. *PARSIMONIA*, 8(2), 105–117.
- Pramasha, R. R., & Restianita, O. (2024). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi , Indeks Pembangunan Manusia , dan Tingkat Tenaga Kerja Terhadap Kemiskinan Ekstrem di Pulau Jawa Tahun 2013-2022. *EKOMA: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi*, 3(4), 1708–1724. <https://doi.org/https://doi.org/10.56799/ekoma.v3i4.3592>

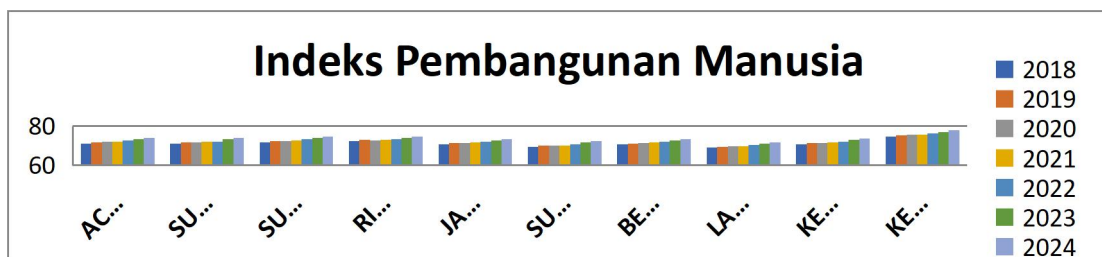
- Prasetyo, I., Syahriza, R., & Tarigan, A. A. (2025). Kontekstualisasi Ekonomi Syariah Dalam Distribusi Pendapatan Dan Kekayaan : Perspektif Q.S Al-Hasyr Ayat 7. *Jurnal Studi Islam Dan Sosial*, 6(1), 15–28.
- Rahmadi, S., Siregar, S. D. R., & Rosmeli. (2024). Determinan ketimpangan distribusi pendapatan di Pulau Sumatera. *Jurnal Paradigma Ekonomika*, 19(4), 941–952.
- Retnowati, D., & Zumaeroh. (2023). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia. *EKOMA: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi*, 2(2), 520–530.
- Salsabila, N. A., Andriani, S., Mirisda, & Nohe, D. A. (2022). Analisis pengaruh tingkat partisipasi angkatan kerja dan indeks pembangunan manusia terhadap tingkat pengangguran terbuka menggunakan regresi probit dan logit. *Prosiding Seminar Nasional Matematika, Statistika, Dan Aplikasinya*, 344–353.
- Sholikah, N. R., & Imaningsih, N. (2022). Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Ketimpangan Distribusi Pendapatan Di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012-2021. *Jurnal Pendidikan Ekonomi*, 10(3), 247–253. <https://doi.org/https://doi.org/10.26740/jupe.v10n3.p247-253>
- Sibatuara, T. C., & Hutabarat, R. E. (2025). Kausalitas Antara Pertumbuhan Ekonomi Dengan Ketimpangan Pendapatan Di Indonesia Dan Thailand : Studi Komparatif. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 7(2), 295–301. <https://doi.org/https://doi.org/10.36985/sc546e06>
- Sipahutar, S. R., & Nasution, A. M. (2023). Pengaruh Ipm, Pdrb Per Kapita, Dan Jumlah Pengangguran Terhadap Jumlah Penduduk Miskin Provinsi Sumatera Utara. *PROFJES : Profetik Jurnal Ekonomi Syariah*, 2(1).
- Sugiarti, I., & Erdkhadifa, R. (2023). Analisis Faktor-Faktor yang Berpengaruh terhadap Ketimpangan Pendapatan di Jawa Timur Tahun 2021. *Jurnal Ekonomi Keuangan & Bisnis Syariah*, 5(5), 2427–2441. <https://doi.org/10.47467/alkharaj.v5i5.3498>
- Sugiarto, I. (2025). *Pengantar Ekonomi Islam*. CV. Intake Pustaka.
- Sutrisno, Anggraini, S. R., & Alfiana, S. (2024). Pengaruh IPM dan Investasi Terhadap Ketimpangan Pendapatan Antar Wilayah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur Tahun 2017-2021. *Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi*, 3(5), 2058–2068.
- Todaro, M. P., & Stephen, C. S. (2006). *Pembangunan Ekonomi (Jilid 1)*. PT. Erlangga.
- Wijayaningrum, T. N. (2023). Pengaruh Kepadatan Penduduk , Jumlah Tenaga Kerja , dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di Provinsi Jawa Tengah. *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 4(2), 549–557.
- Windi, L. C. O., Sodik, J., & Nuryadin, D. (2022). Determinan Ketimpangan Distribusi Pendapatan Kabupaten/Kota Dan Keterkaitan Spasial (Studi Kasus: D.I. Yogyakarta Tahun 2013-2020). *SIBATIK JOURNAL*, 1(5), 737–754.
- Wiza, Y., & Puteri, H. E. (2023). Pengaruh PDRP Perkapita Terhadap Disparitas Pendapatan Provinsi di Indonesia Tahun 2017-2021 dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Journal Of Management and Sharia Business*, 1(2), 50–63. <https://doi.org/https://doi.org/10.30983/krigan.v1i2.7756>
- Yoertiara, R. F., & Feriyanto, N. (2022). Pengaruh pertumbuhan ekonomi, IPM, dan tingkat pengangguran terbuka terhadap ketimpangan pendapatan provinsi-provinsi di pulau Jawa. *Jurnal Kebijakan Ekonomi Dan Keuangan*, 1(1), 92–100. <https://doi.org/10.20885/jkek.vol1.iss1.art9>
- Yulianita, A., Mardhian, D., & Mukhlis. (2023). Ketimpangan dan Prospek Perekonomian di Pulau Sumatera. *Jurnal Informatika Ekonomi Bisnis*, 5(3), 664–669. <https://doi.org/10.37034/infeb.v5i3.612>
- Yulikasari, & Samsuddin, M. A. (2025). Analisis Dinamis Hubungan Antara Kepadatan Penduduk, PDRB Per Kapita, dan Ketimpangan Wilayah di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Dan Keuangan*, 3(3), 352–362. <https://doi.org/https://doi.org/10.61132/moneter.v3i3.1594>
- Yunus, S., Paskual, M. F., & Haprin, N. (2021). Analisis Pola Konsumsi Dan Ketimpangan Pendapatan Kota Palu, Kabupaten Sigi Dan Kabupaten Donggala Tahun 2020. *JIMEA Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, Dan Akuntansi)*, 5(3), 2497–2511.
- Zusanti, R. D., Sasana, H., & Rusmijati. (2020). Analisis pengaruh ipm, pertumbuhan ekonomi

dan tpt terhadap ketimpangan wilayah di pulau jawa 2010-2018. *DINAMIC: Directory Journal of Economic*, 2(3), 602–615.

GAMBAR DAN TABEL



Gambar 1. Grafik PDRB Per Kapita Provinsi Sumatera Tahun 2018-2024
Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) 2024



Gambar 2. Grafik Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Pulau Sumatera
Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) 2024

Tabel 1. Data Ketimpangan Pendapatan Pulau Sumatera 2018-2024

Provinsi	Ketimpangan Pendapatan						
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Aceh	0,318	0,321	0,319	0,323	0,291	0,296	0,294
Sumatera Utara	0,311	0,315	0,314	0,313	0,326	0,309	0,306
Sumatera Barat	0,305	0,307	0,301	0,300	0,292	0,280	0,287
Riau	0,347	0,331	0,321	0,327	0,323	0,324	0,306
Jambi	0,335	0,324	0,316	0,315	0,335	0,343	0,315
Sumatera Selatan	0,341	0,339	0,338	0,340	0,330	0,338	0,331
Bengkulu	0,355	0,329	0,323	0,321	0,315	0,333	0,343
Lampung	0,326	0,331	0,320	0,314	0,313	0,324	0,301
Kep. Bangka Belitung	0,272	0,262	0,257	0,247	0,255	0,245	0,235
Kepulauan Riau	0,339	0,337	0,334	0,339	0,325	0,340	0,357

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) 2024

Tabel 2. Data Tingkat Pengangguran Terbuka Pulau Sumatera Tahun 2018-2024

provinsi	Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Provinsi						
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Aceh	6,34	6,17	6,59	6,30	6,17	6,03	5,75

Sumatera Utara	5,55	5,39	6,91	6,33	6,16	5,89	5,60
Sumatera Barat	5,66	5,38	6,88	6,52	6,28	5,94	5,75
Riau	5,98	5,76	6,32	4,42	4,37	4,23	3,70
Jambi	3,73	4,06	5,13	5,09	4,59	4,53	4,48
Sumatera Selatan	4,27	4,53	5,51	4,98	4,63	4,11	3,86
Bengkulu	3,35	3,26	4,07	3,65	3,59	3,42	3,11
Lampung	4,04	4,03	4,67	4,69	4,52	4,23	4,19
Kep. Bangka Belitung	3,61	3,58	5,25	5,03	4,77	4,56	4,63
Kepulauan Riau	8,04	7,50	10,34	9,91	8,23	6,80	6,39

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) 2024

Tabel 3. Analisis Statistik Deskriptif

	Y	X1	X2	X3
Mean	0.314843	43323.49	5.276143	72.39457
Median	0.321000	36990.00	5.060000	72.17000
Maximum	0.357000	96157.00	10.34000	77.97000
Minimum	0.235000	22495.00	3.110000	69.02000
Std. Dev.	0.026202	21052.75	1.443590	1.804334

Sumber: Eviews 13, (data diolah 2025)

Tabel 4. Hasil Uji Chow

Redundant Fixed Effects Tests
 Equation: Untitled
 Test cross-section fixed effects

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	41.717508	(9,57)	0.0000
Cross-section Chi-square	141.850307	9	0.0000

Sumber: Eviews 13, (data diolah 2025)

Tabel 5. Hasil Uji Hausman

Correlated Random Effects - Hausman Test

Equation: Untitled

Test cross-section random effects

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	1.092197	3	0.7790

Sumber: Eviews 13, (data diolah 2025)

Tabel 6. Hasil Uji Lagrange Multiplier

Lagrange Multiplier Tests for Random Effects

Null hypotheses: No effects

Alternative hypotheses: Two-sided (Breusch-Pagan) and one-sided (all others) alternatives

	Test Hypothesis		
	Cross-section	Time	Both
Breusch-Pagan	145.4796 (0.0000)	2.520729 (0.1124)	148.0004 (0.0000)

Sumber: Eviews 13, (data diolah 2025)

Tabel 7. Hasil Uji Multikolinearitas

	X1	X2	X3
X1	1.000000	0.452981	0.705567
X2	0.452981	1.000000	0.560381
X3	0.705567	0.560381	1.000000

Sumber: Eviews 13, (data diolah 2025)

Tabel 8. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Heteroskedasticity Test: White
 Null hypothesis: Homoskedasticity

F-statistic	2.241814	Prob. F(3,66)	0.0916
Obs*R-squared	6.473400	Prob. Chi-Square(3)	0.0907
Scaled explained SS	10.89939	Prob. Chi-Square(3)	0.0123

Sumber: Eviews 13, (data diolah 2025)

Tabel 9. Uji t

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.786336	0.115201	6.825799	0.0000
X1	0.000657	0.000417	1.577093	0.1196
X2	-0.002399	0.001778	-1.349523	0.1818
X3	-0.006731	0.001713	-3.929378	0.0002

Sumber: Eviews 13, (data diolah 2025)

Tabel 10. Uji f

F-statistic	5.992760
Prob(F-statistic)	0.001125

Sumber: Eviews 13, (data diolah 2025)

Tabel 11. Koefisien Determinasi

R-squared	0.214082
Adjusted R-squared	0.178359

Sumber: Eviews 13, (data diolah 2025)